

SEKILAS MEDIA

<http://www.waspada.co.id>
Selasa, 5 Juli 2011

“Pembahasan Asahan Harus Tanggung Jawab”

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta Pemkab Asahan proaktif melakukan penagihan pengembalian kerugian daerah sebesar Rp10,3 miliar dari hasil audit 2005 – 2010. Terdapat 27 kasus kerugian negara di Kabupaten Asahan yang merupakan hasil temuan BPK dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) selama kurun waktu tahun anggaran 2005 – 2010.

Sinar Indonesia Baru
Rabu, 6 Juli 2011

“Menindaklanjuti Hasil Temuan BPK : DPRD Dairi Siap Kembalikan Sisa Uang Reses TA 2010”

Menindaklanjuti Hasil Temuan BPK : DPRD Dairi Siap Kembalikan Sisa Uang Reses TA 2010
Seluruh anggota DPRD Kabupaten Dairi siap mengembalikan sisa uang reses yang telah diterima pada tahun anggaran 2010 jika memang itu keputusan akhir dari LHP BPK RI. DPRD Kabupaten Dairi juga telah mengundang pihak BPK untuk mengkalkulasi berapa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh anggota Dewan.

Harian Analisa
Rabu, 20 Juli 2011

“Mantan Pimpro Dinas PU dan Pengawas Proyek Diperiksa”

Kejari Tebing Tinggi mengungkapkan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tebing Tinggi. Dugaan korupsi ini diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini sudah cukup lama terjadi dan baru diungkapkan kembali setelah dilaksanakannya pemilihan suara ulang Pemilukada 2011.

Sinar Indonesia Baru
Jumat, 29 Juli 2011

“Terkait Temuan BPK Rp1,6 Miliar Bermasalah : Sekwan dan DPRD Labusel Terancam Berurusan dengan KPK”

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya indikasi pelanggaran penggunaan dana APBD TA 2010 Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejumlah Rp1,6 miliar pada sekretariat DPRD. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2010. Sekretaris Dewan dan sejumlah anggota DPRD pun terancam berurusan hukum dengan KPK apabila tidak mengembalikan uang tersebut ke kas negara.



REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),

Hj. Sri Madonna (sm), Hj. Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon),
Ermila Oethari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhyan (ard), Arief R (arra),
Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr)

ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4519039 ext. 321



DARI REDAKSI

Bersiaplah Menghadapi Perubahan.....

Perubahan dalam suatu organisasi ataupun instansi merupakan sesuatu yang tidak dihindari. Rekan kerja yang berganti, tempat kerja yang berpindah, teknologi yang berkembang, semuanya merupakan bagian dari dinamika sehari-hari. Terkadang perubahan tersebut terjadi begitu cepat tanpa kita sadari.

Saat ini BPK RI sedang mengembangkan sistem elektronik audit (e-audit) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini akan membawa perubahan yang signifikan bagi pelaksanaan pemeriksaan yang telah biasa dilakukan.

Di Provinsi Sumatera Utara, pelaksanaan program ini baru sampai pada pembahasan draf nota kesepahaman tentang akses data. Namun demikian, berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut perubahan tersebut. Suksesnya program ini nantinya tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh pihak. Hal ini tentu saja tantangan tersendiri bagi para pemeriksa dan unit penunjang dan pendukung untuk selalu belajar, memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Perubahan tidak akan bisa terelakkan, tinggal bagaimana kita menyikapinya agar kita tetap dapat bertahan menghadapi perubahan tersebut. (mt)

Daftar Isi...

Hal.1

- Dari Redaksi
- Pengambilan Sumpah/
Janji PNS Tahun 2011

Hal.2

- Pembahasan Kedua
MoU e-Audit
- Pertemuan Konsultasi
antara DPRD Kab.Dairi
dengan BPK Sumut

Hal.3

- Penyerahan LHP
BPK RI
- Pesona Samosir

Hal.4

- Sekilas Media

PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI PNS TAHUN 2011



BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diikuti oleh sepuluh calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Rabu, 13 Juli 2011. Acara ini dilaksanakan di auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Oodj Huziat. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat struktural, rohaniwan dari agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik serta karyawan dan karyawan di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut.

Kesepuluh CPNS yang diambil sumpah/janjinya tersebut adalah Azwin Firman Syahbana, Budi Handoyo, Desi Theresia Sidauruk, Diah Kusumawati Rukminingtyas,

Hendra Waskito, Junarwan, Melinda, Muhammad Ibrahim, Ronal Polatua Panggabean dan Tetap Purba. Pengucapan sumpah dipandu oleh Kepala Perwakilan dan diikuti oleh seluruh CPNS yang diambil sumpahnya.

Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji PNS dilakukan secara simbolis sesuai dengan agamanya. Peserta beragama Islam diwakili oleh Melinda dengan saksi Ridwan Sani Matondang dan Suyono. Peserta beragama Kristen Protestan dilakukan oleh Ronal Polatua Panggabean dengan saksi Maruahal Situmorang dan Parulian. Sedangkan untuk peserta beragama Katolik dilakukan oleh Desi Theresia Sidauruk dengan saksi Mikael P.H. Togatorop dan Erika Magdalena Purba. (Arra)



Pembahasan Kedua MoU e-Audit

Selasa, 12 Juli 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut mengadakan acara pembahasan kedua draf nota kesepahaman (MoU) BPK RI dengan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data (*e-audit*). Acara ini dilaksanakan di auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dan dihadiri oleh sekretaris daerah, inspektur dan kepala DPKAD dari tiga belas kota/kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pembahasan kedua ini perlu dilakukan karena ketiga belas kota/kabupaten tersebut belum menyatakan persetujuannya terhadap draf MoU e-audit yang telah disampaikan pada pembahasan pertama, Kamis, 19 Mei 2011 lalu. Sedangkan 21 kota/kabupaten lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah menyatakan persetujuannya.

Bertindak sebagai narasumber dalam acara ini adalah Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hu-

kum Pemeriksaan Keuangan Negara, Eledon Simanjuntak, Kepala Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Negara, Herny Yanuarni dan Kepala Subbagian Dukungan Teknologi Informasi, Iwan Arief Wijayanto dan dimoderatori oleh Mikael P.H. Togatorop, Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut. Dalam acara ini dibahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan draf MoU yang telah disampaikan sebelumnya, diantaranya tentang dasar hukum pelaksanaan MoU, persiapan yang perlu dilakukan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan *e-audit*, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan lain-lain. Para undangan pun secara

aktif melakukan tanya-jawab dengan narasumber sehingga tercapai kata sepakat tentang MoU yang akan dilaksanakan. (dkr)



Pertemuan Konsultasi antara DPRD Kabupaten Dairi dengan BPK Sumut

DPRD Kabupaten Dairi melakukan kunjungan ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Senin, 11 Juli 2011. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Delphi Masdiana Ujung, dan diterima oleh Kepala Perwakilan, Oodj Huziat, beserta para kepala subauditorat dan pejabat struktural lainnya. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010 yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dana reses DPRD. Para anggota DPRD ini meminta kejelasan terkait temuan tersebut dan hal-

hal yang harus dilakukan untuk menindaklanjutinya.

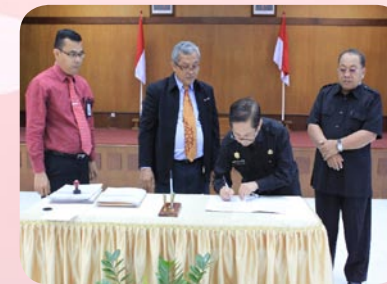
Selain itu juga dibahas tentang beberapa temuan pemeriksaan lainnya. Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI harus disampaikan oleh entitas terkait kepada BPK RI selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP tersebut diterima. BPK pun juga berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan tersebut. (dkr)



Penyerahan LHP BPK RI

Di penghujung bulan Juli 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan dua kali penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Pada Kamis, 28 Juli 2011, pukul 10.00 WIB, bertempat di auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, dilakukan penyerahan LHP BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007, 2008 dan 2009 dan Triwulan III 2010 pada Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. LHP BPK RI ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Oodj Huziat, kepada wakil ketua DPRD dan sekretaris daerah dari kedua kabupaten tersebut.

Sedangkan pada Jumat, 29 Juli 2011, pukul 10.00 WIB, di tempat yang sama, dilakukan penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun TA 2010 oleh kepala perwakilan kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD TA 2010, Kabupaten Simalungun mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Opini sama dengan opini yang diberikan oleh BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD TA 2009. (Arra)



Penandatanganan berita acara penyerahan LHP BPK RI kepada Kabupaten Deli Serdang



Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Simalungun TA 2010 kepada Ketua DPRD



Pesona Samosir

dapat menari-nari sendiri dan menghibur hati Raja Rahat. Patung Sigale-gale masih dapat kita saksikan di Samosir saat ini tetapi patung ini digerakkan oleh tali agar dapat menari.

Dari patung Sigale-gale, perjalanan dilanjutkan ke makam kuno Raja Sidabutar yang terbuat dari batu alam utuh tanpa sambungan. Makam ini telah berusia ratusan tahun. Jasad Raja Sidabutar beserta tiga keturunannya disimpan dalam batu tersebut. Di kawasan ini juga terdapat museum Batak yang dulunya merupakan istana salah seorang raja di Samosir. Di museum ini kita dapat melihat peninggalan masyarakat Batak jaman dahulu seperti peralatan memasak, berburu, alat menenun, alat musik tradisional, tulisan aksara Batak dan lain-lain. Di pulau Samosir kita juga dapat menikmati keindahan Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Jika Samosir terkenal karena merupakan "pulau di atas pulau" maka kedua danau tersebut dapat dikatakan sebagai "danau di atas danau". (dari berbagai sumber)

Pulau Samosir terkenal karena keunikan letaknya yang berada di tengah Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau vulkanik dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pulau ini dulunya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir. Namun sejak tahun 2003 pulau ini mengalami pemekaran dan menjadi sebuah kabupaten tersendiri yaitu Kabupaten Samosir. Tuktuk merupakan pusat wisata di Pulau Samosir. Daerah ini banyak diminati oleh wisatawan karena menawarkan banyak akomodasi yang bersisian langsung dengan Danau Toba.

Tujuan wisata lainnya di Samosir adalah Tomok. Di daerah ini terdapat Batu Parsidangan Siallagan merupakan tempat yang digunakan Raja Siallagan untuk mengadili dan menghukum mati para musuh yang dianggap mengacaukan negeri dan membawa bencana bagi rakyat. Terdapat pula patung Sigale-gale yang merupakan patung kayu yang dapat menari. Patung ini konon merupakan penjelmaan Raja Manggale, putra semata wayang Raja Rahat yang memerintah di Uluan. Raja Manggale terkenal pintar menari. Ketika Raja Manggale jatuh sakit hingga akhirnya meninggal, Raja Rahat sangat berduka. Sampai akhirnya ada tiga orang yang menyanggupi untuk membuat patung yang mirip Raja Manggale. Ketiga orang tersebut kemudian memanggil arwah Raja Manggale untuk masuk ke dalam patung yang mereka buat sehingga patung tersebut

